

Presiden Jokowi Sebut RI Punya Cadangan Beras Cukup pada Hari Pangan Sedunia

JAKARTA - Presiden Joko Widodo menyatakan pemerintah Indonesia telah menyiapkan cadangan beras dengan jumlah yang cukup bertepatan dengan peringatan Hari Pangan Sedunia.

Ucapan Hari Pangan Sedunia itu disampaikan Presiden Jokowi melalui unggahan di akun Instagram miliknya @jokowi dengan sebuah gambar ilustrasi seperti dikutip di Jakarta, Senin (16/10).

Ilustrasi tersebut menggambarkan Presiden Jokowi yang mengenakan kemeja putih dan celana hitam sedang menyirami tanaman pohon. Di sekelilingnya, ada petani yang sedang memanen buah dan sayuran, peternak yang sedang memberi makan sapi, serta peternak gurame yang juga sedang memberi makan ikan.

Dalam keterangan gambar itu, Presiden Jokowi mengatakan bahwa tahun ini merupakan tahun yang berat bagi dunia, ti-



Ilustrasi gambar ucapan Hari Pangan Sedunia yang diunggah melalui Instagram resmi Presiden Joko Widodo.

dak terkecuali Indonesia dalam hal tantangan krisis pangan. "El Nino, kenaikan suhu bumi, kemarau panjang yang menyebabkan gagal tanam dan gagal panen, hingga faktor geopolitik dunia telah mempengaruhi pasokan pangan," tulis Presiden Jokowi dalam keterangan gambar tersebut.

Presiden Jokowi juga menjelaskan bahwa pemerintah Indonesia telah mengantisipasi dengan menyiapkan cadangan beras yang cukup. Selain itu, jauh-jauh hari sebelumnya, infrastruktur yang diperlukan untuk menjaga ketahanan pangan telah dibangun, mulai dari waduk, ribuan embung hingga jaringan irigasi. "Semua tantangan itu telah kita antisipasi dengan menyiapkan cadangan beras yang cukup," tulis Presiden Jokowi.

Dengan kesiapan dini dan perencanaan yang cermat itu lah, Presiden Jokowi meyakini Indonesia akan mampu menghadapi segenap tantangan, baik yang sifatnya global maupun yang terjadi di kawasan, juga yang berlangsung lama sampai yang musiman. (ANTARA)

INSENTIF UNTUK DAERAH YANG MAMPU TANGANI STUNTING

Pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memberikan insentif fiskal bagi pemerintah daerah yang mampu menangani stunting. Insentif ini diberikan berdasarkan data yang dihimpun oleh lintas kementerian/ lembaga.



HOTLINE ANTARA 0812-8825-9462

Kementan Siapkan Langkah Dukung Ketahanan Pangan di IKN

JAKARTA - Kementerian Pertanian (Kementan) menyiapkan sejumlah langkah untuk mendukung ketahanan pangan di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur.

Direktur Jenderal (Dirjen) Tanaman Pangan Kementan Suwandi mengatakan selain dinas setempat, ketahanan pangan di IKN juga perlu melibatkan daerah sekitar. "Untuk wilayah IKN perlu kerja keras, Kaltim tolong dinas dan dinas pertanian kabupaten sekitar Kaltara kemudian sebagian pangan di IKN itu dipasok dari Sulawesi," ujar Suwandi saat webinar bertajuk "Air, Pangan, dan Kehidupan: Tantangan dan Solusi Bagi Ketahanan Pangan di IKN" di pantau di Jakarta, Senin (16/10).

"Jadi, Sulteng, Sulsel sudah siap-siap untuk mengarahkan ke IKN termasuk di daerah Bulungan (Kaltara), kami pacu produksi plus Kalsel," lanjut dia.

Selain memacu produksi, Suwandi memastikan penyaluran kebutuhan pangan ke IKN nantinya juga akan terukur. "Ini sudah melakukan langkah antisipasi berapa yang bisa di-



ANTARA/Benardy Ferdiansyah

Tangkapan layar-Dirjen Tanaman Pangan Kementan Suwandi. alirkan dari daerah-daerah sentra produksi ke wilayah IKN secara terukur dan aspek-aspek logistiknya. Itu yang menjadi fokus kami bersama kepala dinas Kaltim, Kaltara, Kalsel, dan sebagian Sulawesi sudah duduk bareng menghitung kebutuhan-kebutuhannya dan memacu produksinya termasuk nanti pintu perubahan pun sudah terukur," ujar Suwandi.

Dalam kesempatan itu, ia juga menjelaskan soal upaya antisipasi dan adaptasi dampak El Nino di sektor pertanian. Hal tersebut dilakukan untuk mengamankan stok pangan. Ada beberapa cara, salah satunya peningkatan ketersediaan air dengan membangun atau mem-

perbaiki embung, dam parit, sumur dalam, sumur resapan, rehabilitasi jaringan irigasi tersier serta pompanisasi.

Menurut Suwandi, cara pompanisasi termasuk efektif dan bisa ditiru di IKN. "Selama ini kami hitung adalah pompanisasi ini efektif, saya kasih contoh ini supaya ditiru di Kaltim dan IKN di Kabupaten Sragen (Jawa Tengah) itu banyak daerah lahan kering, dia itu swadaya sumur yang di sawah untuk di pompa, itu 23.000 unit satu unit bisa melayani satu hektare atau 1/2 hektare," ungkapny.

Selanjutnya, di Kabupaten Ngawi, Jawa Timur juga memiliki 17.000 sumur submersible di lahan irigasi non-teknis dan tadah hujan sehingga dapat bertanam hingga IP300. "Di Ngawi itu ada sumur submersible kedalaman 60 meter, tinggi masuk pompanya 20 meter itu jumlahnya 17.000. Kami mendatannya dari PLN, PLN yang kabelnya masuk ke sawah untuk pompanya menggerakkan, Jadi, kalau kita berjalan dari Solo ke Surabaya kira-kira jalan itu sawah, di tengah sawah ada kabel listrik, itu pasti sumur daerah lahan kering," tuturnya. (ANTARA)

FOTO CERITA Mendulang Berkah dari Limbah Jelantah



MINYAK goreng merupakan salah satu bahan yang tidak asing dan sering dijumpai setiap harinya. Hampir setiap orang menggunakan minyak goreng untuk keperluan memasak.

Sayangnya, masih banyak yang belum menyadari bahwa membuang minyak goreng bekas atau biasa disebut minyak jelantah dengan sembarangan memiliki dampak yang serius bagi lingkungan serta kesehatan.

Itulah yang membuat Sandi (33) dan Bintang Prakoso (33) berinisiatif untuk memanfaatkan limbah minyak goreng bekas itu agar tidak mencemari lingkungan. Warga Komplek Pondok Cilegon Indah (PCI), Kecamatan Cibeer, Kota Cilegon itu sadar bahwa minyak jelantah jika dibuang begitu saja, akan membawa masalah kepada lingkungan, seperti menyumbat pori-pori tanah, mencemari air, dan menyumbat saluran drainase.

Berawal saat masa pandemi COVID-19, mereka menemukan inspirasi untuk mencoba memanfaatkan minyak jelantah atau Used Cooking Oil (UCO) yang dijadikan sebagai Sustainable Aviation Fuel (SAF) atau bahan bakar pesawat.

Sandi yang merupakan pegawai di salah satu perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sementara Bintang yang bekerja di perusahaan swasta itu kini memanfaatkan hari liburinya untuk mengumpulkan dan menampung minyak jelantah dari warga. Mereka membeli minyak jelantah dari warga dan industri rumah makan untuk kemudian dijual kembali ke perusahaan dan diolah menjadi sumber energi alternatif. Tak hanya membeli, namun warga juga bisa menukar minyak jelantah sebanyak 5 liter untuk ditukar dengan 1 liter minyak goreng kemasan premium darinya. Dalam sebulan, mereka mampu mengumpulkan minyak jelantah sebanyak 2.000 liter minyak jelantah yang dikemas dalam jerigen.

Masyarakat pun tak perlu susah payah untuk mendatangi tempat penampungan minyak jelantahnya, karena ia juga menyediakan layanan antarjemput yang tidak dikenakan tarif.

Usaha yang digelutinya sejak tahun 2020 lalu itu kini sudah memiliki 16 mitra cabang di sejumlah wilayah di Provinsi Banten antara lain Kota Serang, Kabupaten Serang, dan Pandeglang.***

Foto dan teks: Muhammad Bagus Khoirunas

Oleh Indra Arief Priyadi

KRISIS pangan menjadi 'awan mendung' yang merundung para pemimpin dunia pascapandemi COVID-19 karena instabilitas sosial politik bisa bermula dari 'urusan perut' manusia yang tak terpenuhi.

Alarm krisis pangan di Indonesia berbunyi sejak awal tahun menyusul disrupsi rantai pasok global akibat konflik geopolitik beberapa negara di dunia. Krisis pangan kian menjadi momok karena datangnya El Nino yang memicu kekeringan berkepanjangan. Sebagai salah satu negara yang dilintasi garis ekuator, Indonesia mengalami kekeringan panjang sejak pertengahan tahun akibat El Nino yang telah menurunkan produksi pangan di sejumlah wilayah.

Dampak El Nino telah mengakibatkan gagal panen di Sumatera bagian tengah hingga selatan, Pulau Jawa, Bali hingga Nusa Tenggara, Kalimantan bagian selatan, sebagian besar Sulawesi, sebagian Maluku Utara, sebagian Maluku, dan Papua bagian selatan.

Badan Pusat Statistik (BPS) juga memprediksi produksi beras di sisa tahun ini akan turun yang terlihat di empat daerah penghasil utama beras yaitu Sulawesi Selatan yang diperkirakan turun 21,7 persen, Jawa Tengah menurun 17,4 persen, Jawa Barat menurun 11 persen dan Lampung tergerus 4,4 persen.

Di sisi lain, konsumsi beras Indonesia meningkat terlebih menjelang akhir tahun yang merupakan momen konsumsi tinggi. Pada Januari-September 2023 saja, angka proyeksi konsumsi beras nasional mencapai 22,89 juta ton dibandingkan periode sama tahun lalu sebesar 22,62 juta ton.

Siasat Jokowi Meredam Krisis Pangan dan Menjaga Stabilitas

Pelaksana Tugas Menteri Pertanian (Mentan) yang juga Kepala Badan Pangan Nasional (National Food Agency/NFA) Arief Prasetyo Adi membenarkan dampak El-Nino menurunkan produksi beras Indonesia hingga 1,2 juta ton dari target produksi tahun ini sebesar 30 juta ton. Pasokan pangan juga terancam karena negara-negara yang merupakan mitra perdagangan pangan Indonesia menghadapi masalah yang sama. Akibatnya, kebijakan restriksi ekspor pangan harus diterapkan negara-negara tersebut agar pasokan dalam negeri mereka terjaga.

Hingga awal Oktober 2023, terdapat 22 negara yang membatasi ekspor beras. Diketahui, dua negara yang selama ini menjadi eksportir beras ke Indonesia yaitu India dan Vietnam termasuk dari 22 negara tersebut. Hal itu membuat pemenuhan pasokan pangan di dalam negeri kian menantang. Indonesia harus mengamankan perjanjian kuota impor dengan beberapa negara lain meskipun realisasinya belum dibuktikan saat ini.

Stabilisasi harga
El Nino yang menyebabkan cuaca panas ekstrem dan kekeringan mengganggu produksi panen nasional. Suplai air ke sejumlah sentra produksi pangan menurun karena tadanya hujan. Cuaca panas juga menyebabkan kebakaran lahan yang menggagalkan produksi. Akibat gangguan produksi ini, harga beras melonjak. Mempertimbangkan bahwa akhir tahun adalah momentum konsumsi tinggi masyarakat, maka produksi pangan yang menurun ditambah meningkatnya permintaan masyarakat bisa memicu inflasi keluar dari sasaran.

Pelaksana Tugas (Pit) Kepala BPS,



ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan/hp
Arsip foto-Presiden Joko Widodo (kedua kanan) didampingi Menteri BUMN Erick Thohir (ketiga kiri), Mensesneg Pratikno (kedua kiri) dan Dirut Perum Bulog Budi Waseso (kanan) mengecek kondisi beras di Gudang Bulog Dramaga, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Senin (11/9/2023).

Amalia Adiningsih Widayanti, Senin (25/9), mengatakan, hingga akhir September 2023, tren harga beras masih naik dan belum ada tanda-tanda bergerak mendarat atau turun. Harga rata-ratanya mencapai Rp 13.477 per kilogram (kg). Jumlah kabupaten/kota yang mengalami kenaikan harga beras semakin banyak. Pada pekan pertama September 2023, jumlahnya sebanyak 230 daerah, kemudian pada pekan ketiga 2023, bertambah menjadi 284 daerah.

Menurut Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, dampak kenaikan harga beras ke inflasi sebesar 0,05 persen. Sedangkan data dari Kementerian Perdagangan (Kemendag), di Jabodetabek dan Jawa Barat sudah mulai turun, namun

diakui untuk beberapa wilayah lain, stok pangan sumber karbohidrat itu masih tinggi.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengandalkan upaya untuk mencegah krisis pangan, utamanya menjaga ketersediaan dan stabilitas harga. Jokowi memerintahkan agar Perum Bulog menambah pasokan beras operasi pasar Stabilitas dan Pasokan Harga Pangan (SPHP) menjadi 100 ribu ton per bulan dari sebelumnya 50 ribu ton per bulan.

Pemerintah juga akan melanjutkan bansos beras minimal 200 ribu ton per bulan. Dengan begitu, sedikitnya ada tambahan pasokan 300 ribu ton beras per bulan di pasar. Stok beras di gudang Bulog juga akan segera digelontorkan dan tidak menumpuk untuk mengendalikan harga. Beras komersial,

bukan cadangan beras pemerintah (CBP), akan digelontorkan ke penggilingan-penggilingan untuk mempercepat penyaluran beras pengendali harga sekaligus membantu penggilingan beras yang saat ini tidak bisa menyerap gabah karena harga terlalu tinggi.

Upaya tersebut diharapkan mengendalikan harga beras dalam 1-2 bulan ke depan sekaligus menjangkar inflasi sesuai sasaran di tiga persen plus minus satu persen. Selain beras, pemerintah juga terus memantau pergerakan harga jagung agar laju inflasi masih sesuai jangkang pemerintah.

Penambahan 1,5 juta ton beras
Panen padi musim tanam kedua diperkirakan terjadi awal November 2023. Namun, pemerintah ingin mengamankan stok cadangan beras pemerintah untuk menghindari kemungkinan terburuk seperti tidak optimalnya produksi dari panen di November 2023 karena El Nino diperkirakan masih terjadi hingga awal tahun depan.

Pemerintah disebut berupaya untuk mengamankan impor tambahan kuota 1,5 juta ton beras dari Thailand, Vietnam, dan Kamboja. Menurut Pit Mentan, sebanyak 600.000 ton dari tambahan 1,5 juta ton tersebut akan tiba di Indonesia paling lambat 31 Desember 2023. Saat ini cadangan beras pemerintah di Bulog hanya ada sebesar 1,7 juta ton.

Selain impor, pemerintah juga bertekad mengoptimalkan produksi panen di musim tanam kedua tahun ini. Maka perlu ada insentif kepada petani Tanah Air. Bentuk insentif itu bisa berupa ketersediaan infrastruktur penunjang produksi seperti bantuan pasokan air, dan juga ketersediaan benih dan pupuk.

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimoeljono sebelumnya menjamin ketersediaan air mencukupi untuk menunjang produksi panen di November 2023. Indonesia masih menyimpan persediaan air sekitar 2,9 miliar meter kubik untuk 81 persen irigasi. Sumber persediaan air tersebut disuplai dari 3.464 embung di sekitar daerah yang memiliki irigasi. Sumber lainnya dipasok dari 332 setu, 8.213 sumur untuk kebutuhan irigasi pertanian.

Selain beras, kata Pit Mentan, pemerintah juga akan menambah kuota impor untuk jagung pakan ternak dan gula guna mengendalikan harga di pasar yang terus merangkak naik. Untuk jagung pakan misalnya, pemerintah akan menambah kuota impor hingga 250 ribu ton. Sementara untuk gula, pemerintah akan segera merealisasikan sisa 70 persen dari kuota impor tahun ini dengan melakukan penyesuaian kebijakan sebagai insentif agar harga gula di dalam negeri dapat lebih kompetitif dibandingkan harga global.

Dalam mengamankan stok dan menjaga stabilitas harga, impor memang berada dalam daftar pilihan meskipun di urutan terakhir. Pemenuhan pasokan pangan dan stabilisasi harga terus dilakukan pemerintah. Pemenuhan pasokan pangan dan stabilisasi harga memang sudah sepatutnya menjadi prioritas pemerintah di antara lebaran tantangan bangsa, karena pangan menjadi unsur pemenuhan hidup masyarakat yang begitu krusial.

Di masa-masa terakhir kepemimpinannya, fokus Presiden Jokowi untuk menjaga pasokan pangan dan stabilisasi harga perlu dikawal. Hal itu agar masalah pangan tidak bersalin menjadi 'senjata' yang merusak stabilitas sosial, terlebih Pemilu 2024 kian dekat.***